

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatra Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatra. Dilihat dari letak geografisnya, Kota Padang memiliki potensi-potensi daerah yang cukup bervariasi. Potensi-potensi ini terdapat didaerah daratan dan lautan. Luas Kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65 persen dari Provinsi Sumatra Barat. Ketinggian wilayah Kota Padang bervariasi yaitu antara 0–1.853 m di atas permukaan laut. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil. Kota Padang juga memiliki pantai sepanjang 68,126 km serta 19 buah pulau kecil yang menyebar di sisi pantainya.¹

Potensi daerah tidak dapat dilihat hanya dari letak geografisnya saja, melainkan juga dari jumlah penduduk yang berada di daerah tersebut. Jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2015 adalah sekitar 902.413 jiwa. Angka ini dikatakan meningkat sebanyak 12.767 jiwa jika dibandingkan dengan hasil pendataan di tahun 2014 yang hanya berkisar 889.646 jiwa.²

Pengetahuan mengenai potensi daerah akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan sarana dan prasarana. Selain itu, pengetahuan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan,

¹ Sumber data : Badan Pusat Statistika, *Padang Dalam Angka 2016*, (Padang, Badan Pusat Statistika Kota Padang, 2016) hlm. 5-6

² *Ibid.*, hlm 68

serta dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan target pemasukan melalui penerimaan di masa yang akan datang.

Pemerintah Kota Padang harus mengenali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Sebagai ibukota Sumatra Barat, Kota Padang memiliki banyak kelebihan. Salah satu kelebihan itu adalah terdapatnya akses transportasi yang mudah. Kota Padang terletak dekat dengan Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau. Letak Kota Padang yang dekat dengan pelabuhan menjadikan kota ini ramai bagi perdagangan. Kota Padang juga memiliki pariwisata yang mengagumkan. Letak Kota Padang yang dekat dengan bandar udara juga berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Padang. Kota Padang juga menjadi pusat pendidikan di wilayah sumatra bagian tengah, ditopang dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi. Dilihat dari potensinya dapat disimpulkan bahwa ada tiga sektor utama yang dapat dikembangkan oleh pemerintah Kota Padang yaitu sektor pariwisata, pendidikan, dan perdagangan.

Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi daerah, pembangunan sarana pariwisata menjadi kebutuhan sekaligus sarana perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan penduduk. Kota Padang memiliki objek wisata yang cukup bervariasi yang terdiri dari objek wisata alam, wisata sejarah, serta objek wisata bahari.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang tahun 2015 adalah sebanyak 3.355.772 orang. Wisatawan ini terdiri dari 3.298.454 wisatawan domestik dan 57.318 wisatawan asing. Kunjungan wisatawan ini meningkat sebesar 3,12 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya

3.254.359 orang, yang terdiri dari 3.199.392 wisatawan domestik dan 54.967 wisatawan asing.³

Jumlah wisatawan ini sangat berpengaruh pada sarana dan prasarana Kota Padang. Saat ini sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang dimiliki oleh Kota Padang relatif memadai. Sarana dan prasarana ini antara lain hotel berbintang, hotel tidak berbintang, biro perjalanan, toko souvenir dan rumah makan/restoran. Jumlah hotel di Kota Padang pada tahun 2015 adalah sebanyak 102 buah, yang terdiri dari 26 buah hotel berbintang dan 76 buah hotel tidak berbintang. Jumlah toko souvenir pada tahun 2015 adalah sebanyak 27 buah. Jumlah rumah makan/restoran pada tahun 2015 adalah sebanyak 265 buah.⁴

Dalam hal pendidikan, pengelolaan pendidikan Kota Padang dapat dikatakan baik dan berhasil di Sumatra Barat. Hal ini terbukti dengan banyaknya prestasi sektor pendidikan yang di peroleh. Salah satu prestasi yang diperoleh adalah hasil dari Ujian Nasional. Berdasarkan indikator nilai Ujian Nasional tahun 2015, Kota Padang berada di peringkat ketiga tertinggi pada tingkat SMA/MA sederajat, serta di peringkat kedua pada tingkat SMK.⁵

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan program

³ *Ibid.*, 331

⁴ *Ibid.*, 334-336

⁵ Redaksi, "Inilah Ranking Kota/Kabupaten Tertinggi Hasil UN di Sumatera Barat Tahun Ajaran 2015/2016", diakses dari <http://sumbar1.com/inilah-ranking-kotakabupaten-tertinggi-hasil-un-di-sumatra-barat-tahun-ajaran-2015-2016/>, pada tanggal 27 April 2017 pukul 13.22.

pendidikan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Saat ini, sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kota Padang sudah dapat dikatakan lebih baik dari pada sarana dan prasarana pendidikan daerah lain di Provinsi Sumatra Barat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelajar-pelajar dari luar daerah yang belajar di Kota Padang, terutama pendidikan perguruan tinggi. Dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Kota Padang terdapat 10 buah Universitas, 1 buah Institut, 26 buah Sekolah Tinggi, 3 buah Politeknik dan 18 buah Akademi. Jumlah mahasiswa dari tahun 2009-2014 cenderung meningkat. Akan tetapi pada tahun 2015 jumlah mahasiswa adalah sebanyak 454.197 orang. Jumlah mahasiswa tersebut berkurang dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2014 jumlah mahasiswa adalah sebanyak 472.637 orang.⁶

Banyaknya pelajar yang datang dan bersekolah ke Kota Padang berdampak pada bertambahnya peluang usaha masyarakat disekitar perguruan tinggi. Peluang usaha tersebut dapat berupa penyediaan kos-kosan, rumah makan/restoran, cafe, tempat hiburan dan lain-lain. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Begitu pula dalam hal perdagangan, Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatra Barat merupakan pintu masuk dan keluar berbagai jenis komoditi perdagangan terutama perdagangan dalam negeri. Kota Padang merupakan penyumbang terbesar bagi perdagangan Sumatra Barat yaitu 28,72

⁶ Sumber data : Badan Pusat Statistika, *Statistik Daerah Kota Padang 2016*, (Padang, Badan Pusat Statistika Kota Padang, 2016) hlm. 13

persen.⁷ Oleh karena itu, Kota Padang merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat perdagangan di Sumatra Barat.

Sektor perdagangan di Kota Padang terus mengalami peningkatan, hal ini didukung dengan terus dikembangkan dan diperbaikinya pasar-pasar yang telah ada. Sampai saat ini Kota Padang memiliki 17 buah pasar yang lokasinya tersebar hampir diseluruh kecamatan.

Setiap potensi yang dimiliki oleh Kota Padang akan mempengaruhi keuangan Kota Padang. Dengan diberlakukannya otonomi daerah setiap daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pemberian wewenang dalam bidang keuangan daerah tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh pada kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki suatu target anggaran yang layak.

APBD merupakan suatu perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam suatu periode. APBD

⁷ Sumber data : Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat* (Sumatera Barat : BPS, 2016), hlm. 50

dapat dijadikan sebagai alat kebijakan fiskal daerah untuk mempengaruhi pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

APBD memiliki dua unsur utama yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Dengan meningkatnya PAD, diharapkan suatu daerah dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Adapun target dan realisasi PAD Kota Padang pada tahun 2013-2015 dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2013–2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	238.889.759.534,00	238.871.896.576,23
2014	307.350.120.985,90	315.678.797.930,44
2015	402.035.190.681,00	370.413.732.165,05

Sumber data : DPKA Kota Padang (data diolah)

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa PAD Kota Padang dari tahun 2013–2015 mengalami peningkatan. Tabel 1.1 juga memperlihatkan bahwa

pada tahun 2014 realisasi PAD melebihi target, sedangkan pada tahun 2012 dan 2015 realisasi PAD Kota Padang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target PAD seringkali dilakukan dengan pendataan dan proyeksi terhadap sumber-sumber PAD. Dalam meningkatkan pendapatan daerah berbagai macam usaha dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan yang sudah ada atau dengan memperluas sumber-sumber pendapatan yang ada serta menggali potensi sumber pendapatan yang baru.

Sumber utama PAD terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi pajak daerah Kota Padang tahun 2015 didominasi oleh pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, dan pajak bumi dan bangunan. Jumlah penerimaan dari pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp. 83.551.662.000,00, pajak hotel dan restoran sebesar Rp. 40.969.985.000,00, pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 34.952.839.000,00. Sementara itu, realisasi retribusi daerah Kota Padang pada tahun 2015 didominasi oleh penerimaan dari rumah sakit umum daerah, dinas tata ruang, tata bangunan dan perumahan, serta dinas kebersihan dan pertamanan. Jumlah penerimaan dari rumah sakit umum daerah adalah sebesar Rp. 15.746.890.000,00, dinas tata ruang, tata bangunan, dan perumahan sebesar Rp. 12.015.689.000,00, dinas kebersihan dan pertamanan sebesar Rp. 6.701.993.000,00.⁸

Peningkatan PAD akan mempengaruhi APBD Kota Padang sehingga Kota Padang dapat membiayai seluruh kebutuhan belanjanya, baik itu belanja

⁸ Sumber data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

tidak langsung maupun belanja langsung. Target dan realisasi belanja Kota Padang Tahun 2013–2015 dapat dilihat dalam tabel 1.2 .

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Belanja Kota Padang Tahun 2013–2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	1.875.768.690.217,86	1.619.577.687.943,00
2014	2.143.967.152.247,99	1.794.324.395.903,00
2015	2.408.291.804.913,53	1.948.501.777.319,96

Sumber data : DPKA Kota Padang (data diolah)

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa realisasi belanja Kota Padang dari tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan. Belanja Kota Padang didominasi oleh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jumlah belanja pegawai pada tahun 2015 mencapai Rp. 1.138.041.803.000,00, belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp. 496.335.266.000,00, belanja modal sebesar Rp. 287.576.579.000,00.⁹

Dari dua tabel diatas, dapat diketahui bahwa PAD Kota Padang belum mampu untuk membiayai seluruh belanja yang dibutuhkan oleh daerahnya. Hal ini menyebabkan sebagian besar pengeluaran pemerintah Kota Padang masih dibiayai oleh dana alokasi dari pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah Kota Padang harus terus berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan penerimaannya, sehingga Kota Padang mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri.

⁹ Sumber data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang (data diolah)

Kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari potensi daerah dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Halim¹⁰ Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituang dalam APBD, maka dapat digunakan analisis rasio keuangan. Menurut Mahsun¹¹ terdapat banyak macam rasio keuangan, karena rasio keuangan dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisis. Adapun rasio yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
2. Rasio efektifitas PAD
3. Rasio keserasian
4. Rasio pertumbuhan

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan PAD dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain. Pendapatan yang berasal dari sumber lain berupa pendapatan transfer dari pusat dan pinjaman. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Rasio efektifitas PAD dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang bersumber dari PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

¹⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, (Salemba Empat, Jakarta, 2007), hlm. 241

¹¹ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (BPFE, Yogyakarta, 2006), hlm.

Rasio keserasian terdiri dari dua komponen yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Rasio belanja tidak langsung dapat diukur dengan membandingkan belanja tidak langsung dengan total belanja daerah. Sementara itu, belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Rasio belanja langsung dapat diukur dengan membandingkan belanja langsung dengan total belanja daerah. Rasio keserasian bermanfaat untuk mengetahui besarnya proporsi dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung atau belanja langsung.

Rasio pertumbuhan merupakan perbandingan komponen penerimaan atau pengeluaran pada suatu periode dengan periode sebelumnya. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari suatu periode ke periode berikutnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Padang cukup bervariasi. Potensi-potensi ini akan mempengaruhi kemampuan keuangan Kota Padang sehingga pemerintah Kota Padang akan berusaha mengelola keuangan daerahnya sebaik mungkin. Kemampuan Kota Padang dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dihitung dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Dengan menggunakan

analisis rasio ini dapat diketahui apakah kemampuan keuangan Kota Padang mengalami peningkatan atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terjadi peningkatan kemampuan keuangan Kota Padang tahun 2013–2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan keuangan Kota Padang pada tahun 2013–2015 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.
2. Bagi pemerintah Kota Padang, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kemampuan keuangan Kota Padang sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian sejenis.



